

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1987, *Landreform Indonesia Suatu Perbandingan*, Alumni, Bandung.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manulang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Balai Taman Nasional Siberut, 2015, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Siberut Tahun 2016 s/d 2025*, Balai Taman Nasional Siberut, Padang.
- Bernhard Limbong (selanjutnya disebut Bernhard Limbong II), 2012, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka; Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015, *Laporan Akhir Kajian Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2008, *Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga*, Jakarta
- Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2011, *Taman Nasional di Indonesia*, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- D.H. Koesumahatmadja, 1975, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hilman Nugroho, 2007, *Pedoman Kriteria dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi*, Direktorat Jenderal PHKA, Bogor.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto, 1991, *Usaha Untuk Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar harapan.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, 2005, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi dan Departemen Dalam Negeri.
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori dan Perundang-undangan*, Nuansa dan Nusamedia, Jakarta.
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *green constitution*, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Bismark dan Reny Sawitri, 2014, *Nilai Penting Taman Nasional*, Forda Press, Bogor.
- Muhammad Yamin, 2003, *Jawaban singkat pertanyaan-pertanyaan dalam komentar atas UUPA*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Madia Group, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1995, *Hukum Administrasi Negar*, Ghalia, Jakarta Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M Hadjon, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ridwan AR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusadi Kartaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- RPTN Balai Taman Nasional Siberut tahun 2016 s/d 2025.
- Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritis dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Surjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke- 11, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Pemberdayaan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Unit Taman Nasional Siberut, 1995, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Siberut Periode 1995 s/d 2000*, Unit Taman Nasional Siberut, Padang.

Zainudin Ali, 2008, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Azazi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.02/IV-SET/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.